



KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

KASUS HAJI, KPK BISA PANGGIL JOKOWI ?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertekad terus melakukan pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji, hingga masalah ini benar-benar tuntas. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pada Selasa (12/8/2025) mengatakan bahwa KPK tidak akan tebang pilih dalam kasus ini dan semua pihak berpeluang dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Bahkan, KPK menyatakan tidak menutup kemungkinan KPK akan memanggil Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) sebagai atasan langsung Menteri Agama (Menag) periode 2020-2024, Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut). Kasus dugaan korupsi kuota haji ini bermula pada 2023, di mana saat itu, Presiden RI Jokowi bertemu dengan Pemerintah Arab Saudi hingga memperoleh kuota haji tambahan sebanyak 20 ribu. Namun, pemanggilan Jokowi dan juga saksi-saksi lainnya tergantung dari kebutuhan penyidik, jadi mereka bisa dipanggil bisa tidak. KPK sendiri masih belum membeberkan siapa saja yang akan dipanggil sebagai saksi. Meski demikian, Budi menandakan bahwa KPK berkomitmen untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menag Gus Yaqut. KPK juga telah mencegah Gus Yaqut dan dua orang lainnya untuk bepergian ke luar negeri.

BACA HAL 11...

TENTANG KASUS KOUTA HAJI

STATUS PENYELIDIKAN KPK

- Tahapan saat ini: Sudah naik ke Penyidikan, namun belum menentukan tersangka
- Fokus: Dugaan korupsi kuota haji khusus tambahan
- Jumlah kuota yang disorot: 20.000 jemaah (tambahan dari Arab Saudi)
- Kuota dibagi: 10.000 reguler & 10.000 haji khusus
- Potensi pelanggaran: Jual-beli kuota, alihfungsi kuota, penyalahgunaan wewenang

MASALAH UTAMA YANG DIDUGA

- Kuota haji diperdagangkan secara ilegal melalui biro tertentu
- Nilai ekonomi kuota sangat besar, melibatkan praktik rente
- Ketidaksinkronan regulasi, membuka celah manipulasi sistem
- Lemahnya pengawasan internal Kemenag & pengabaian UU

Wakil Menteri
Perdagangan (Wamendag)
Dyah Roro Esti.

PEMERINTAH GODOK SOLUSI ROJALI, ROHANA, DAN ROHALUS

Istilah rombongan jarang beli (Rojali), rombongan hanya nanya (Rohana), dan rombongan hanya elus-elus (Rohalus) belakangan ini viral di media sosial, terutama di kalangan para pengusaha ritel dan pengamat ekonomi. Istilah-istilah ini dibuat untuk menggambarkan fenomena perilaku konsumen di pusat perbelanjaan, khususnya mal, yang cenderung ramai pengunjung tapi sepi transaksi. Terkait masalah ini pemerintah tengah menggodok Solusi.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Dyah Roro Esti, mengatakan pihaknya tengah bekerja sama dengan berbagai macam asosiasi membahas solusi tersebut. "Di pemerintah, Kementerian Perdagangan, berupaya untuk menawarkan berbagai macam solusi agar masyarakat masih berbelanja (langsung). Kami bekerja sama dengan berbagai macam asosiasi," ucap Dyah Roro dikutip dari Antara, Selasa (12/8/2025).

Roro menjelaskan bahwa munculnya fenomena rojali, rohana, dan roh halus, disebabkan perubahan gaya hidup konsumen yang sekarang lebih suka belanja secara online. "Sehingga, apa yang terjadi? Kalau mereka berkunjung ke mal, mereka lebih suka untuk menonton film di bioskop, makan ke restoran, dan at the end (pada akhirnya), baru mereka berbelanja," kata Roro.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, merespons fenomena rombongan rojali dan lainnya. Ia menyebut fenomena ini bukan pertanda ekonomi terganggu.

Menurutnya, ada perpindahan aktivitas belanja masyarakat ke toko daring atau online shop. "Sementara sekarang ekonomi itu berkembang sekali kan? Model dan cara jual beli (belanja) juga berkembang, sektor logistik kita tumbuh loh," kata Hasan.

Sementara itu, Ekonom sekaligus Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) Piter Abdullah menilai, sepi pusat perbelanjaan (mal) bukan disebabkan fenomena Rojali maupun Rohana dan Rohalus, melainkan karena perubahan gaya hidup masyarakat yang kini serba digital.

Peralihan gaya hidup tersebut mendorong masyarakat lebih memilih berbelanja melalui niaga elektronik (e-commerce) dibanding datang langsung ke mal. "Kita bisa melihat bagaimana sekarang mal-mal sepi. Bukan karena Rojali atau Rohana, tetapi utamanya karena gaya hidup yang berubah. Sekarang kita pergi ke

mal bukan untuk belanja, karena belanjanya sudah dilakukan secara online," ujarnya dalam konferensi pers Peluncuran Laporan Riset Ekonomi Digital di Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Piter menjelaskan, perubahan perilaku ini juga terlihat di supermarket yang kini jarang dipenuhi antrean pembayaran. Sebab, mayoritas masyarakat sudah membeli pakaian, makanan, bahkan kebutuhan sehari-hari secara daring karena dianggap lebih mudah dan murah.

"Sekarang ini saya hampir enggak pernah lagi belanja di mal. Semuanya online. Bahkan belanja kebutuhan sehari-hari untuk masak itu online," terangnya.

Ia menambahkan, transaksi digital kini mencakup berbagai sektor, termasuk munculnya lapangan kerja baru seperti pekerja gig dan kreator konten. Maka dari itu menurutnya, fenomena Rojali atau Rohana tidak berarti konsumsi masyarakat menurun, melainkan terjadi pergeseran pola belanja dari luring ke daring.

"Sebenarnya Rojali, Rohana itu bukan mengindikasikan bahwasannya konsumsi benar-benar turun. Karena sebenarnya terjadi pergeseran dari cara kita belanja yang selama ini belanja langsung di pusat perbelanjaan, di mal, menjadi online," kata dia.

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan konsumsi rumah tangga Indonesia tumbuh sebesar 4,97

persen secara tahunan (yoy) pada triwulan II 2025. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama laju ekonomi nasional yang tercatat 5,12 persen triwulan II tahun ini.

Kontribusinya mencapai 2,64 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan yang terbesar yakni 54,25 persen.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh.

E d y M a h m u d mengatakan, kuatnya konsumsi rumah tangga mencerminkan daya beli masyarakat yang tetap terjaga di tengah perubahan pola belanja, terutama dengan maraknya transaksi daring (online).

Ia menyebut, fenomena pergeseran dari konsumsi luring (offline) ke online kemungkinan belum banyak terungkap secara statistik karena aktivitas yang tidak mudah terlihat secara langsung.

"Kita hanya menyampaikan data memang konsumsi demikian. Jadi, ada hal yang baru yang mungkin belum diungkap, adanya fenomena shifting belanja secara offline

ke online," ungkapnya.

Charles berpandangan fenomena ini perlu diatasi. Ia pun mendorong agar pemerintah melalui kementerian terkait, meninjau kembali kebijakan fiskal yang sedang berjalan. "Dalam konteks perlambatan konsumsi masyarakat, evaluasi diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara

penerimaan negara dan daya beli masyarakat," ungkap Charles.

Anggota komisi DPR bidang keuangan itu menilai harus ada langkah reformasi fiskal yang perlu dilakukan. Khususnya, kata Charles, program-program kerakyatan yang sangat dibutuhkan masyarakat.

"Perluasan skema bantuan sosial berbasis konsumsi perlu dipertimbangkan, termasuk penguatan subsidi energi dan pangan sebagai bantalan terhadap inflasi," sebut Legislator dari Dapil Jawa Timur IV itu.

Charles menambahkan bahwa reformasi ini diharapkan mampu memulihkan keyakinan masyarakat dalam melakukan konsumsi, yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan domestik.

"Dibutuhkan kebijakan yang langsung menyentuh lapisan masyarakat bawah agar mereka memiliki ruang fiskal untuk belanja dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional," ujar Charles.

Charles meyakini, fenomena 'Rojali' dan 'Rohana' ini pastinya mendapat perhatian serius dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita tahu Presiden Prabowo Subianto sangat concern terhadap persoalan ekonomi, khususnya ekonomi kerakyatan. Jadi saya yakin pemerintahan Presiden Prabowo akan melakukan intervensi-intervensi terhadap fenomena ini," ujar Charles.

"Tentunya dengan tujuan peningkatan daya beli masyarakat yang akan sangat bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Karena saat daya beli menurun, ekonomi akan lemah, UMKM terpuruk, dan perlemahan ekonomi pastinya berdampak ke rakyat," lanjutnya.

Charles juga berharap gejolak ekonomi akibat berbagai faktor, termasuk geopolitik, dapat segera mereda. Ia kembali mendorong adanya intervensi yang konstruktif dari Pemerintah untuk mengatasi pelemahan ekonomi. (han,ant,ist/lut)



**Di pemerintah,
Kementerian
Perdagangan,
berupaya untuk
menawarkan
berbagai macam
solusi agar
masyarakat masih
berbelanja
(langsung). Kami
bekerja sama
dengan berbagai
macam asosiasi,**

DYAH RORO ESTI
Wamendag RI

MPR MINTA RUU EBT SEGERA DISAHKAN

Percepatan transisi energi menuju energi terbarukan demi menunjang target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen membutuhkan payung hukum secepatnya. Selain itu, perubahan iklim juga mendesak adanya transisi energi. Untuk itu, Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno, menekankan supaya Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) segera bisa disahkan.

Untuk mencapai pertumbuhan 8 persen, pertumbuhan itu harus dibarengi dengan aspek keberlanjutan, salah satunya adalah dengan pemanfaatan energi terbarukan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk bisa segera memiliki payung hukum untuk mempercepat proses transisi energi menuju energi terbarukan melalui pengesahan Energi Baru dan Terbarukan," kata Eddy dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk "RUU EBT, Peran DPR dalam Mendorong Penerapan Energi Terbarukan" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Dia menekankan pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan percepatan pembangunan, tetapi juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan, salah satunya adalah dengan pemanfaatan energi terbarukan.

"Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk bisa segera memiliki payung hukum untuk mempercepat proses transisi energi menuju energi terbarukan melalui pengesahan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan," tuturnya.

Eddy mengatakan pembahasan RUU EBT masih bergulir di Komisi XII DPR RI selaku alat kelengkapan dewan (AKD) yang membidangi urusan energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi.

Dia berharap pengesahan RUU EBT tidak sekedar menjadi payung hukum, tetapi menjadi landasan pula dalam penyusunan peta jalan terkait pengembangan energi baru dan terbarukan di tanah air.

"Agar kita memiliki tidak hanya sekedar payungnya saja, tetapi kita juga memiliki peta jalan yang definitif untuk mengembangkan semua potensi energi terbarukan yang ada di seluruh Indonesia, yang jumlahnya sangat besar," ujarnya.

Menurut dia, apabila sumber energi terbarukan di Indonesia yang sangat melimpah dimanfaatkan secara optimal maka Indonesia tidak lagi

perlu mengimpor energi seperti bahan bakar minyak (BBM), liquefied petroleum gas (LPG), ataupun minyak mentah.

"Jadi semua bisa tercukupi dari seluruh energi terbarukan yang sumbernya melimpah di Indonesia," ucapnya.

Legislator itu pun berharap pengesahan RUU EBT nantinya akan menjadi tonggak sejarah penting dalam upaya Indonesia membangun pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Hal tersebut, kata dia, sejalan dengan target pemerintah untuk mencapai target net zero emission pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat.

"Agar ini menjadi tonggak baru dalam sejarah Indonesia bahwa kita nanti akan membangun perekonomian ke depan secara berkelanjutan maupun berbasis energi terbarukan," kata dia.

Selain itu, Eddy juga mengatakan bahwa dampak perubahan iklim juga mendorong percepatan transisi dari energi fosil ke energi terbarukan melalui RUU EBT. Menurutnya, saat ini Indonesia sudah menghadapi dampak perubahan iklim. "Oleh karena itu, kami menginisiasi

Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk "RUU EBT, Peran DPR dalam Mendorong Penerapan Energi Terbarukan" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/8/2025). (ANTARA)



payung hukum yang memberikan kepastian bahwa kita melakukan transisi energi dari energi fosil menuju energi terbarukan," ujarnya dilain kesempatan.

Transisi tersebut penting untuk mengurangi dampak buruk dari energi kotor terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Eddy mengakui adanya kendala dalam transisi ke energi terbarukan ini, termasuk aspek keekonomian dan infrastruktur.

Kendala tersebut di antaranya, biaya pembangunan energi terbarukan yang lebih tinggi dan keterbatasan infrastruktur seperti jaringan transmisi.

Namun, kata dia, transisi energi tidak bisa ditunda karena dampaknya akan sangat luas. Mulai dari kesehatan, kualitas pertanian, investasi, hingga perdagangan internasional.

Ia berharap pembahasan RUU EBT dapat segera diselesaikan. Jika tidak pembahasan RUU EBT molor, Indonesia bisa tidak kompetitif dalam perdagangan internasional. Indonesia juga akan semakin tertinggal di bidang pengelolaan dan penanganan permasalahan krisis iklim.

"Saya berharap dalam satu dua masa sidang ke depan ini harus selesai. Kalau enggak, Indonesia akan rugi," ucapnya.

Di sisi lain, upaya penanganan

krisis iklim juga akan dilakukan melalui RUU Pengelolaan Perubahan Iklim (PPI). "Mudah-mudahan kami juga bisa mendorong (rancangan) undang-undang EBET, agar secara holistik kita bisa melakukan transisi energi ini, kita bisa memperbaiki kualitas udara kita, lingkungan hidup kita juga semakin akan semakin baik ke depan," tutur Wakil Ketua MPR RI ini.

Kolaborasi Atasi Krisis Iklim Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI, Jalal Abdul Nasir mengimbau seluruh pihak untuk bekerja sama mengatasi krisis iklim. Kolaborasi lintas sektor, kata dia, bukan hanya untuk memenuhi target iklim, melainkan juga memastikan manfaat nyata bagi masyarakat. Misalnya, membuka lapangan kerja hijau dan memperkuat ketahanan ekonomi bangsa di masa depan.

"Menghadapi tantangan krisis iklim yang kian nyata, kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Pemerintah, DPR, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat harus bergerak dalam satu visi untuk menjaga lingkungan, mempercepat transisi energi bersih, dan melindungi sumber daya alam yang menjadi penopang hidup kita," ujar Jalal.

Terpisah, Pakar Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), Chandra Wahyu Purnomo, mendukung percepatan RUU EBT. Hal itu guna adanya transisi dari energi fosil ke energi terbarukan seiring meluasnya dampak perubahan iklim.

"Kita mendukung adanya RUU ini, karena memang perubahan iklim sudah tampak. Jadi baiknya, ada peraturan tertinggi dari negara untuk hal ini," katanya dilansir Pro3 RRI, Minggu (10/8/2025).

Menurutnya, regulasi yang ada harus dapat mensinkronkan dengan semua target. Seperti target penurunan karbon yang harus ditentukan. "Lalu kalau ada target penurunan emisi, itu juga memikirkan substitusi bahan bakar. Pastinya ekonomi tidak boleh terdampak dan harus berkeadilan," katanya. (han,ant,ist/lut)



Untuk mencapai pertumbuhan 8 persen, pertumbuhan itu harus dibarengi dengan aspek keberlanjutan, salah satunya adalah dengan pemanfaatan energi terbarukan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk bisa segera memiliki payung hukum untuk mempercepat proses transisi energi menuju energi terbarukan melalui pengesahan Energi Baru dan Terbarukan,"

EDDY SOEPARNO

Wakil Ketua MPR RI Sekaligus anggota Komisi XII DPR RI



Tambang ilegal muncul lagi di IKN. (Dok.Camat Desa Suko Milyo)

Belum usai kehebohan pertambangan batu bara ilegal di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan kawasan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kalimantan Timur, kini muncul kasus baru. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap adanya aktivitas tambang ilegal komoditas bauksit di wilayah Cibinong, yang lokasinya tak jauh dari Jakarta.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan temuan aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) atau tambang ilegal di dekat Jakarta. Tambang ilegal tersebut adalah pertambangan komoditas bauksit yang berlokasi di Cibinong, Jawa Barat.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM Rilke Jeffri Huwae mengatakan pihaknya akan fokus pada penertiban tata kelola, meski pertambangan ilegal di wilayah pinggir Jakarta tersebut terhitung berskala besar.

"Kalau dari sini, di Cibinong termasuk besar ya. Cuma persoalan kita bukan besar kecil, persoalan kita yang penting kalau memang itu berdampak untuk tertib tata kelola, kita lakukan," katanya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa (12/8/2025).

Adapun, proses penyelidikan telah dilakukan oleh pihaknya atas aktivitas PETI di wilayah yang hanya 1 jam dari pusat Jakarta tersebut. "Cibinong ya, itu sudah ada penindakan. Ada tambang galian di sana, itu mineral, bukan galian C, itu mineral logam. Sudah ada beberapa penyelidikan juga kita lakukan,"

Terindikasi, aktivitas pertambangan ilegal ini dilakukan oleh salah satu perusahaan dalam negeri. Adapun, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai miliaran rupiah, meski Rilke belum menyebutkan angka pastinya.

"Yang jelas itu (potensi kerugian negara) miliaran lah, kalau urusan tambang pasti miliaran. (Perusahaan)

dalam negeri," bebarnya.

Dengan begitu, langkah penindakan akan terus dilakukan oleh pihaknya secara menyeluruh. Mulai September mendatang, Ditjen Gakkum juga akan memperkuat sisi administrasi dalam penanganan perkara pertambangan ilegal dalam negeri.

"Dan itu dilakukan paralel dengan

DARI JAKARTA HINGGA IKN, TAMBANG ILEGAL MASIH MENGGURITA

penyiapan sisi pengadministrasian penanganan perkara. Ini kebijakan baru ya," tandasnya.

Di sisi lain, Kementerian ESDM juga mengungkapkan akan menindaklanjuti aktivitas pertambangan batu bara ilegal di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan kawasan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kalimantan Timur.

Rilke mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti pidana atas kegiatan ilegal tersebut. Sedangkan pihaknya akan mengurus sanksi administrasi pertambangan tanpa izin (PETI) tersebut.

"Kita arahnya ke sana, kita sudah koordinasi. Jadi pidananya nanti dilaksanakan oleh teman-teman penyidik di Mabes Polri. Nah kita akan

lihat aspek administrasinya. Jadi kita akan ke depankan sanksi administrasinya," jelasnya. . (wid,rla,cnbb/dya)

Gambaran Tambang Ilegal di Indonesia

- **Luas tambang ilegal:** BPKP mencatat luas area tambang ilegal telah mencapai sekitar 300.000 hektare, dengan mayoritas lokasi tersebar di kawasan hutan lindung dan cagar alam, seperti di Sumatera Selatan (peringkat tertinggi), Riau, dan Sumatera Utara.

- **Kerugian negara:** Aktivitas PETI (Pertambangan Tanpa Izin) diperkirakan merugikan negara hingga Rp700 triliun, seiring dengan eksploitasi emas, bauksit, timah, batu bara, dan lainnya

- Beberapa penemuan tambang ilegal:

- **Batubara Di Tahura Bukit Soeharto, Samboja, Kutai Kartanegara, Kaltim (IKN).** Ditemukan 160 ha tambang ilegal, 351 kontainer batubara, kerugian Rp 5,7 T sudah ada 3 tersangka

- **Timah di Pulau Bangka (konsesi timah)** Ada 5 perusahaan tersangka dengan kerugian Rp 29 T (fiktif) dan Rp 271 T (lingkungan)

- **Emas di Sekotong, Lombok.** Dikelola sindikat Tiongkok. Sudah ada satu terdakwa Tiongkok dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan denda USD 1,



bahwa banyak tambang ilegal justru merasa aman karena menyeteropungli kepada oknum pengawas tambang maupun pejabat pemerintahan.

"Dan juga sanksi kepada tambang yang ilegal ini masih sangat ringan dan kalau tambang ilegal bermunculan kan seharusnya mereka yang udah tau bisa dilihat bisa dilacak tambang ilegalnya dilakukan penegakan hukum aturannya sudah jelas sebenarnya tapi penegakan hukumnya yang kurang. Itu yang membuat tambang ilegal masif," kata Bhima. (wid,cnbc,ist/dya)

Ada Faktor Ekonomi hingga Bekingan

DIREKTUR Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai persoalan PETI merupakan masalah struktural yang telah berlangsung cukup lama dan cenderung dibiarkan begitu saja.

"Ada beberapa faktor masih adanya tambang ilegal. Bahkan di dekat lokasi prioritas seperti IKN. Yang pertama saya kira ini masalah koordinasi dan juga masalah pembiaran," ungkap Bhima beberapa waktu lalu.

Bhima mengatakan, maraknya PETI juga tidak terlepas dari lemahnya koordinasi antar lembaga, terutama antara Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan pemerintah daerah. Menurutnya, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, kewenangan perizinan tambang berada di tangan pemerintah daerah.

Namun, setelah kewenangan tersebut ditarik ke pemerintah pusat, banyak pemda memilih untuk lepas tangan dalam hal pengawasan. Sementara, kapasitas pusat untuk

mengawasi seluruh wilayah tambang di Indonesia sangat terbatas.

Kondisi itu lantas membuat pengawasan menjadi longgar dan tambang-tambang ilegal pun bermunculan di mana-mana. Ditambah lagi, terdapat keterlibatan aktor lokal dalam mendukung keberlangsungan tambang ilegal.

"Kedua, ada faktor aktor-aktor lokal yang melakukan beking atau menjaga tambang-tambang ilegal tadi. Nah dinasti politik konglomerat lokal itu mendukung adanya praktik tambang yang ilegal, termasuk juga pendanaan politik pada saat Pemilu. Itu banyak studinya menunjukkan ke sana, jadi ada pembiaran," ujarnya.

Di samping itu, lonjakan harga komoditas juga menjadi pemicu masifnya aktivitas tambang ilegal, terutama seperti tambang emas. Sebagai contoh, saat harga emas hampir menyentuh Rp 1,9 juta per gram, banyak tambang emas ilegal baru bermunculan.

Kemudian, persoalan yang paling serius adalah korupsi dalam penegakan hukum. Ia mengatakan

ROYALTI MUSIK MAKIN GADUH TERBARU, ACARA NIKAHAN KENA 2%

Bukan mereda, polemik royalti musik malah makin gaduh. Terbaru, Wahana Musik Indonesia (WAMI) sebagai salah satu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Indonesia, menegaskan penggunaan lagu dalam acara pernikahan tetap dikategorikan membayar royalti.

Head of Corporate Communications & Memberships WAMI, Robert Mulyarahardja, menyebut tarif royaltinya yakni sebesar dua persen dari biaya produksi musik dikenakan untuk acara hajatan.

"Ketika ada musik yang digunakan di ruang publik, maka ada hak pencipta yang harus dibayarkan. Prinsipnya seperti itu," kata Robert saat dikonfirmasi, Selasa (12/8/2025).

"Untuk musik live yang tidak menjual tiket, seperti acara pernikahan, tarifnya dua persen dari biaya produksi musik (sewa sound system, backline, fee penampil, dll)," jelas dia.

Ia menyebut, pihak yang menanggung pembayaran adalah penyelenggara acara, bukan musisi atau pengisi hiburan. Dalam hal pernikahan, maka biaya royalti dibebankan kepada wedding organizer atau pun yang punya hajatan.

"Betul, penyelenggara acaranya [yang membayar royalti]," ucap dia. "Dibayarkan kepada LMKN, beserta dengan data penggunaan lagu (songlist) dari acara tersebut," paparnya.

Kemudian, kata Robert, pembayaran tersebut disalurkan LMKN kepada LMK yang berada di bawah naungan LMKN.

Pembayaran ini kemudian disalurkan LMKN kepada LMK-LMK yang berada di bawah naungan LMKN, dan kemudian LMK menyalurkan royalti tersebut kepada komposer yang bersangkutan," ujar dia.

Robert belum menjelaskan mekanisme penghitungannya apakah royaltinya itu 2 persen itu per lagu yang dibawakan atau keseluruhan dari penampilan band itu.

Sebelumnya, hal berbeda dijelaskan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Prof Ahmad M Ramli. Profesor yang turut merancang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjelaskan bahwa acara bersifat sosial dan non-komersial tidak termasuk objek penarikan royalti. Dalam hal ini, acara pernikahan, ulang tahun, atau hajatan bukanlah merupakan acara sosial yang bersifat komersial.

Dengan demikian, memutar atau

menyanyikan lagu di acara tersebut tidak akan dikenakan royalti. "Para user ini adalah pasar industri musik yang sesungguhnya. Tanpa pengguna, sebuah lagu dan musik, sebagus apapun, menjadi relatif tak memiliki arti karena tidak ada yang membeli dan menggunakan," ujar Ahmad saat menjadi saksi ahli dalam sidang uji materiil UU Hak Cipta di Mahkamah Konstitusi, Kamis (7/8/2025), yang disiarkan melalui kanal YouTube MK.

Menurutnya, pengguna justru berperan penting menghidupkan industri musik. Lagu yang dinyanyikan atau diputar di berbagai ruang sosial dapat memperluas jangkauan dan popularitasnya. "Mereka menggunakan membuat musik bisa dinikmati berbagai ruang sosial, tetapi juga sekaligus menjadi agen iklan tanpa perlu disuruh," ujarnya.

Namun, Ahmad menegaskan, royalti wajib dibayarkan jika

pemanfaatan musik bersifat komersial. Misalnya untuk konser berbayar, acara bersponsor, atau bisnis hiburan. Dalam kondisi ini, pembayaran dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sesuai ketentuan yang berlaku. Kata kuncinya adalah 'komersial'. Selama kegiatan bersifat sosial tanpa embel-embel mencari keuntungan, maka tidak dipungut royalti.

Penarikan royalti di Indonesia diatur berdasarkan aktivitas komersial dan jenis usaha, mengacu pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor HKI.02/2016. Contohnya, sebuah kafe kecil dengan kapasitas 20 kursi yang memutar musik untuk pelanggan dikenai tarif Rp120.000 per kursi per tahun untuk Hak Cipta dan Hak Terkait. Total royalti tahunan yang harus dibayar mencapai Rp2,4 juta, belum termasuk pajak. (wid,rls,kum/dya)



Ari Lasso Ungkap Dugaan 'Permainan' hingga Salah Transfer

Tak hanya kisruh di kalangan warga, musisi juga mengkritisi terkait sistem pembayaran royaltinya. Musisi Ari Lasso meluapkan kekecewaannya terhadap kinerja Wahana Musik Indonesia (WAMI) terkait pengelolaan royalti.

Lewat unggahan di Instagram, mantan vokalis Dewa 19 itu menyebut hanya menerima sekitar Rp700 ribu dari puluhan juta rupiah yang seharusnya diterimanya. Ari mengungkapkan detail royalti yang seharusnya ia

dapatkan. Dari sekitar Rp 30 juta, ia hanya mendapatkan Rp 765.594.

Selain itu, Ari juga terkejut ketika mengetahui dana tersebut justru ditransfer ke rekening seseorang bernama Mutholah Rizal. Ia mempertanyakan apakah laporan yang diterimanya adalah miliknya atau milik orang lain.

"Lembaga dengan manajemen yang (maaf) sangat buruk, yang sangat berpotensi merugikan, bisa negara, dalam hal ini Dirjen Pajak,

TARIF ROYALTI MUSIK

1. RESTORAN DAN KAFE

- Royalti Pencipta: Rp60.000 per kursi per tahun
- Royalti Hak Terkait: Rp60.000 per kursi per tahun

2. PUB, BAR, DAN BISTRO

- Royalti Pencipta: Rp180.000 per meter persegi per tahun
- Royalti Hak Terkait: Rp180.000 per meter persegi per tahun

3. DISKOTIK DAN KLUB MALAM

- Royalti Pencipta: Rp250.000 per meter persegi per tahun
- Royalti Hak Terkait: Rp180.000 per meter persegi per tahun

4. NADA TUNGGU TELEPON

- Royalti Pencipta dan Hak Terkait: Rp100.000 per sambungan telepon

5. BANK DAN KANTOR

- Royalti Pencipta dan Hak Terkait: Rp6.000 per meter persegi per tahun

6. GEDUNG BIOSKOP

Royalti Pencipta dan Hak Terkait: Rp3.600.000 per layar per tahun

7. PAMERAN DAN BAZAR

- Royalti Pencipta dan Hak Terkait: Rp1.500.000 per hari

8. TRANSPORTASI UDARA (PESAWAT)

- Saat Terbang (In Flight)

Jumlah penumpang × tarif indeks × durasi musik × persentase audibility

- Saat di Darat (On Ground)

Tarif indeks × jumlah penumpang × durasi musik

Keterangan:

- Tarif indeks = 0,25% dari harga tiket terendah

- Persentase audibility standar = 10%

9. TRANSPORTASI DARAT DAN LAUT

Rumus Umum:

Jumlah penumpang × tarif indeks × durasi musik × audibility

dan yang pasti banyak merugikan musisi anggota anda," tulisnya.

Ari Lasso pun mendesak agar pihak yang berwajib melakukan pemeriksaan terhadap WAMI. Tujuannya agar lembaga tersebut berbenah dan tak ada lagi insiden seperti ini di kemudian hari.

"Banyak 'permainan' atau kecerobohan yang cukup layak rasanya untuk diperiksa lembaga negara. Dalam hal ini mungkin BPK, KPK, atau Bareskrim. Bukan untuk menghukum, tapi menjadikan @wami.id sebagai sebuah lembaga yang kredibel," jelasnya.

Meski mengaku tidak serakah, Ari menegaskan bahwa uang royalti adalah hak wajar bagi pelaku industri musik. Ia juga menyinggung Adi Adrian, musisi yang kini menjabat sebagai ketua WAMI, untuk memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut. (wid,rls,ist/dya)

SURVEI STATUS GIZI SEBUT STUNTING KOTA MALANG NAIK JADI 22,4%



(Ilustrasi) Imunisasi upaya pencegahan stunting Puskesmas Arjowinangun, Kedungkandang, Kota Malang. (dok. Puskesmas Arjowinangun)

MALANG - Angka stunting di Kota Malang naik menjadi 22,4 persen pada 2024 berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Untuk menekan lonjakan ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang melibatkan 27 perguruan tinggi melalui program Kampus Bergerak Peduli Stunting atau Kabar Penting.

"Kota Malang kalau dievaluasi tahun 2024 kemarin, stunting kita menurut SSGI berada di 22,4 persen. Tahun sebelumnya 17 persen. Dengan

peningkatan ini, kami mencari apa yang belum terlibat. OPD sudah, lintas sektor sudah, dan yang belum terpikir adalah perguruan tinggi," ujar Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif, Selasa (12/8/2025).

Dari hasil evaluasi tersebut, Husnul menyebutkan telah merancang pola kerja sama dengan kampus-kampus yang memiliki basis keilmuan atau program studi (prodi) di

bidang kesehatan.

Menurutnya, langkah awal dilakukan dengan menggelar pertemuan daring bersama perwakilan perguruan tinggi untuk menjelaskan rencana program dan target yang ingin dicapai.

"Dari situ, muncul lah istilah Kabar Penting atau Kampus Bergerak Peduli Stunting. Jadi dengan ini, perguruan tinggi nanti akan terlibat langsung dalam pembinaan dan pemantauan

wilayah binaan terkait penanganan stunting," paparnya.

Saat ini, Husnul menyebutkan ada sebanyak 27 perguruan tinggi di Kota Malang yang memiliki program studi kedokteran, kesehatan masyarakat, keperawatan, kebidanan, dan gizi ikut berpartisipasi.

Kampus-kampus tersebut akan dibagi untuk membina 57 kelurahan yang ada di Kota Malang. Dengan masing-masing kampus mendapatkan jatah 2 hingga 3 wilayah binaan.

"Jumlah tenaga yang dikerahkan tergantung prodinya, karena cakupan stunting tiap wilayah berbeda. Ada daerah yang kasusnya sedikit, ada juga yang besar. Kalau berjalan baik, di 2026 kami ingin melibatkan semua perguruan tinggi yang ada di Kota Malang. Totalnya ada 67 kampus," jelas Husnul.

Lebih lanjut, dijelaskannya, perguruan tinggi yang terlibat akan mengerahkan mahasiswa tingkat akhir yang telah memiliki bekal pengetahuan kuat terkait stunting dan pencegahannya.

Mereka akan bekerja sama dengan

organisasi profesi di kampus seperti dokter, bidan, dan perawat, untuk memberikan edukasi kesehatan, pembinaan, dan pendampingan bagi balita stunting yang mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan.

Program Kabar Penting juga akan memetakan wilayah yang menjadi atensi khusus. Berdasarkan data, beberapa kelurahan memiliki prevalensi stunting tinggi seperti Mergosono, sementara wilayah seperti Rampil Celaket tergolong rendah.

"SSGI ini kan berbasis sampling, jadi tidak semua balita dilakukan sensus. Tetapi secara kewilayahan, memang ada daerah-daerah yang jumlah kasusnya lebih tinggi dan ada juga yang rendah," imbuhnya.

Menurut Husnul, evaluasi program akan dilakukan secara berkala setiap dua bulan sekali. Evaluasi meliputi progres yang telah dicapai serta rencana tindak lanjut.

"Harapannya, akhir 2025 kita sudah tidak di angka 22,4 persen. Paling tidak harus mendekati angka nasional, sekitar 14 sampai 17 persen," tutup Husnul. (Santi/Dya)

TAK ADA DINAS EKRAF, BUPATI MALANG PILIH DIGABUNGAN DENGAN DISPARBUD

MALANG- Bupati Malang, Sanusi memutuskan tidak membentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) untuk Dinas Ekonomi Kreatif (Ekraf). Menurutnya, bidang ekonomi kreatif nantinya akan digabungkan ke dalam Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud).

Keputusan tersebut, kata Sanusi, diambil berdasarkan arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. "Sudah, sudah dibahas. Jadi sudah ada pertimbangan. Saya sempat membahas rencana pembentukan Dinas Ekraf ini saat bertemu dengan Wamendagri RI, Pak Bima pas beliau ke Kabupaten Malang April lalu," ujarnya, dikutip Selasa (12/8/2025).

Selain itu, Sanusi juga mengaku sempat berdiskusi dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar terkait pembinaan sektor ekonomi kreatif yang berada di bawah koordinasi kementerian tersebut.

"Jadi dari keduanya, sementara ini petunjuknya menjadi bagian dulu.

Bukan berbentuk dinas. Jadi nanti ikut di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, nanti ada subbagian ekonomi kreatif. Kami tidak membentuk dinas baru," katanya. Ditegaskan Sanusi, bidang ekonomi kreatif akan mulai dijalankan di bawah Disparbud pada tahun 2025 ini. "Insyaallah sudah siap digabung di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dilaksanakan di tahun ini," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib telah bertemu dengan Menteri Ekonomi Kreatif RI Teuku Riefky Harsya di Jakarta pada 22 Juli 2025 lalu. Dalam pertemuan itu, Lathifah memaparkan arah kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Malang.

"Dengan menerapkan arah kebijakan dan strategi yang terencana, diharapkan ekonomi kreatif di Kabupaten Malang dapat berkembang pesat. Jadi nanti bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat," jelas Lathifah.

Ia menyebut, Pemkab Malang juga telah membahas pembentukan bidang khusus di Disparbud untuk memperkuat kelembagaan sektor ekonomi kreatif. "Mwskipun tidak berbentuk dinas, tetapi dengan adanya konsentrasi tersendiri, ada bidangnya, nanti ini bertujuan agar pengelolaan sektor ekonomi kreatif lebih terstruktur. Lebih terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah," ujarnya.

Untuk diketahui, pedoman pembentukan Dinas Ekraf di daerah mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Ekraf dan Kemendagri. Kementerian Ekraf mendorong setiap daerah membentuk dinas yang menaungi sektor tersebut. Guna menjadikannya mesin pertumbuhan ekonomi baru.



Bupati Malang, Sanusi. (Santi/Lentera)

Kemenekraf menilai, setiap daerah memiliki potensi besar di sejumlah subsektor seperti film, animasi, fesyen, dan musik. Sementara Kemendagri mengingatkan, pembentukan SOTK baru harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia dan potensi sektor yang akan dikembangkan. (Santi/Dya)



Xi Jinping dan Donald Trump. (Foto: Reuters)

AS-CHINA SEPAKATI GENCATAN TARIF DAGANG

Mundur 90 Hari, Berlaku 10 November

Amerika Serikat dan China sepakat memperpanjang gencatan tarif selama 90 hari, menanggukhkan penerapan bea masuk tiga digit pada produk masing-masing, sementara pengecer AS bersiap menambah stok menghadapi musim liburan akhir tahun yang penting.

ditimbulkan kebijakan perdagangan Trump terhadap model pertumbuhan ekonomi berorientasi ekspor yang telah lama berlaku.

"Saya rasa baik China maupun Amerika Serikat tidak ingin hubungan mereka terus memburuk," kata Wang Mingyue, seorang profesional berusia 39 tahun yang bekerja di bidang robotika.

"Itulah sebabnya keduanya

mengambil pendekatan saat ini, tetapi permainan dan konfrontasi mungkin belum berakhir - jadi masih ada risiko."

Pasar menunjukkan optimisme terhadap terobosan antara kedua negara adidaya tersebut, dengan saham-saham Asia meningkat dan mata uang sebagian besar stabil, setelah tidak mengalami perubahan selama berminggu-minggu. (Reuters, ist/nei)

Amerika Serikat dan China sepakat memperpanjang gencatan tarif selama 90 hari, menanggukhkan penerapan bea masuk tiga digit pada produk masing-masing, sementara pengecer AS bersiap menambah stok menghadapi musim liburan akhir tahun yang penting.

Presiden AS Donald Trump menyampaikan melalui platform Truth Social pada Senin bahwa ia telah menandatangani perintah eksekutif untuk menunda penerapan tarif yang lebih tinggi hingga pukul 12:01 dini hari EST (05.01 GMT) pada 10 November, dengan seluruh ketentuan gencatan senjata lainnya tetap berlaku.

Kementerian Perdagangan China mengeluarkan jeda paralel pada tarif tambahan pada Selasa pagi, juga menunda selama 90 hari penambahan perusahaan AS yang telah ditargetkan pada bulan April ke daftar pembatasan perdagangan dan investasi.

"Amerika Serikat terus berdiskusi dengan RRT untuk mengatasi kurangnya timbal balik perdagangan dalam hubungan ekonomi kita dan kekhawatiran keamanan nasional serta ekonomi yang ditimbulkannya," demikian pernyataan perintah eksekutif Trump, menggunakan akronim untuk Republik Rakyat China, dikutip pada Selasa (12/8/2025).

Gencatan senjata tarif antara Beijing dan Washington seharusnya berakhir pada hari Selasa pukul 12.01 EDT (04.01 GMT). Perpanjangan hingga awal November ini memberikan waktu krusial bagi lonjakan impor musim gugur untuk musim Natal, termasuk barang elektronik, pakaian jadi, dan mainan dengan tarif yang lebih rendah.

Perintah baru ini mencegah tarif AS atas barang-barang China melonjak hingga 145%, sementara tarif China atas barang-barang AS ditetapkan mencapai 125%—tarif yang akan mengakibatkan embargo perdagangan virtual antara kedua negara. Perintah

ini mengunci—setidaknya untuk saat ini—tarif 30% atas impor China, dengan bea masuk China atas impor AS sebesar 10%.

Ada kelegaan di jalan-jalan ibu kota China, tempat para pejabat bergulat dengan tantangan yang

• Dampak Ekonomi Tarif Trump Pada AS-China •

Aspek Ekonomi	Dampak pada Amerika Serikat
1. Pertumbuhan Ekonomi (PDB)	PDB turun untuk pertama kali dalam beberapa tahun.
2. Harga & Biaya	Biaya produksi naik, berpotensi picu inflasi.
3. Ekspor & Perdagangan	Neraca dagang dengan China terendah 21 tahun, impor berkurang.
4. Industri yang Terdampak	Sektor energi bersih, konstruksi, dan ritel tertekan.
5. Respons & Strategi	Respons terbatas, hanya pengurangan impor.
6. Dampak Jangka Panjang	Rantai pasokan global tidak pasti.

Konflik Persempit Ruang Ekonomi Global

DALAM tiga dekade terakhir, hubungan dagang antara Amerika Serikat dan China telah memberikan keuntungan bagi masyarakat umum di kedua belah pihak. Mengingat hal ini penting ketika mendekati tenggat negosiasi perdagangan pada Selasa (12/8/2025).

Sekitar 30 tahun lalu, China baru mulai menempatkan diri sebagai mitra dagang penting di ekonomi global. Pada 1995, Amerika Serikat hanya mengimpor barang senilai \$48,5 miliar dari negara tersebut, namun kini angka itu melonjak menjadi \$439 miliar. Lonjakan perdagangan ini membawa keuntungan bagi keduanya.

Selama lebih dari dua abad, para ekonom memahami bahwa perdagangan antarnegara terjadi berdasarkan prinsip keunggulan komparatif, di mana setiap negara

memproduksi barang yang dapat dibuatnya dengan efisiensi relatif lebih tinggi. Mekanisme ini menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar bagi kedua pihak, sehingga meningkatkan standar hidup masyarakat secara keseluruhan.

Mainan dan furnitur merupakan dua kategori impor konsumen terbesar dari China. Harga mainan telah turun 87,5 persen sejak 1995, sementara harga furnitur pada dasarnya tidak berubah. Televisi dan pakaian jadi juga merupakan dua kategori impor populer lainnya. Sejak 1995, harga televisi telah turun 98,5 persen, sementara harga pakaian jadi tidak berubah. Sementara itu, indeks harga konsumen secara keseluruhan telah meningkat sebesar 111 persen.

Biaya produksi yang lebih rendah terkait perdagangan dengan China

merupakan alasan utama penurunan harga-harga ini relatif terhadap inflasi. Hal ini menghasilkan peningkatan upah riil karena rakyat Amerika biasa mampu membeli lebih banyak. Sementara itu, peningkatan impor tidak mengurangi jumlah lapangan kerja bagi rakyat Amerika. Total lapangan kerja sipil telah meningkat dari 132 juta pada tahun 1995 menjadi 170 juta saat ini.

Perdagangan internasional tidak mengubah jumlah lapangan kerja di AS, tetapi mengubah komposisinya: kehilangan pekerjaan bergaji dan berproduktivitas rendah, mendapat pekerjaan bergaji dan berproduktivitas tinggi. Pembatasan perdagangan bisa memulangkan sebagian pekerjaan bergaji rendah dari China, namun apakah itu benar-benar membuat Amerika lebih baik? (Independent Institute, ist/nei)

Mengenal Oil Pulling, Perawatan Gigi Ala Nikita Willy

Baru-baru ini, aktris Nikita Willy membuat publik terkejut, bukan karena busana atau liburannya, melainkan karena rutinitas perawatan giginya di rumah. Melalui sebuah unggahan, Nikita membagikan langkah-langkah perawatan gigi yang ia lakukan setiap hari. Banyak warganet yang salah fokus pada sikat gigi elektrik dan pasta gigi mewah yang digunakan Nikita. Padahal, inti dari rutinitas tersebut bukanlah pada peralatan mahal.

Ia justru menekankan pentingnya perawatan gigi dasar yang sering kali terabaikan, seperti membersihkan sela-sela gigi dengan benang gigi (flossing), membersihkan lidah, hingga teknik menyikat gigi yang benar. Semua langkah ini dapat dilakukan di rumah tanpa mengeluarkan biaya besar. Salah satu langkah yang menarik perhatian adalah oil pulling, yaitu metode berkumur menggunakan minyak kelapa.

Apa Itu Oil Pulling?

Oil pulling adalah teknik membersihkan mulut dengan cara berkumur menggunakan minyak kelapa selama beberapa menit, mirip seperti memakai obat kumur. Teknik ini memanfaatkan sifat minyak yang dapat menarik dan mengikat kotoran, bakteri, serta racun di dalam mulut. Selama

proses berkumur, minyak akan bercampur dengan air liur dan menjangkau celah-celah gigi serta gusi.

Praktik ini telah dikenal sejak lama dalam pengobatan tradisional, khususnya di India, sebagai bagian dari perawatan kesehatan mulut alami. Minyak kelapa sering dipilih karena memiliki sifat antibakteri alami, namun minyak wijen dan minyak zaitun juga kerap digunakan sebagai alternatif.

Metode oil pulling dipercaya mampu membantu menjaga kesehatan gigi dan gusi, mengurangi plak, dan membuat napas terasa lebih segar. Meski demikian, teknik ini sebaiknya dilakukan sebagai pelengkap, bukan pengganti kebiasaan menyikat gigi dan menggunakan benang gigi secara rutin.

Manfaat Oil Pulling

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa oil pulling dengan minyak kelapa dapat membantu mengurangi jumlah bakteri penyebab gigi berlubang. Kebiasaan ini juga berpotensi menurunkan pembentukan plak dan mengurangi peradangan pada gusi atau gingivitis. Berikut adalah beberapa manfaat oil pulling untuk kesehatan gigi dan mulut

Menghambat Pertumbuhan Bakteri

Berkumur dengan minyak kelapa setiap hari selama 10-15 menit diketahui dapat membantu mengurangi jumlah bakteri di dalam mulut, termasuk bakteri *Streptococcus mutans*. Bakteri ini merupakan salah satu jenis bakteri

yang sering menyebabkan penumpukan plak dan kerusakan gigi. Dengan kata lain, oil pulling dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk membersihkan karang gigi secara alami.

Mencegah dan Mengobati Radang Gusi

Riset menyebutkan bahwa oil pulling dengan minyak kelapa atau minyak wijen memiliki efek yang hampir serupa dengan chlorhexidine, yaitu larutan antiseptik yang biasa terkandung dalam obat kumur untuk mengobati dan mencegah radang gusi (gingivitis).

Tak hanya itu, oil pulling dengan kedua minyak nabati tersebut juga mampu mengurangi pembentukan plak gigi di dalam rongga mulut dan mengatasi keluhan gusi bengkak dan nyeri.

Mencegah Gigi Berlubang

Selain dapat mengurangi plak gigi dan pertumbuhan bakteri di dalam mulut, oil pulling juga dinilai dapat membantu mencegah gigi berlubang. Namun, manfaat ini hanya bisa diperoleh, jika Anda juga rutin menyikat gigi 2 kali sehari, serta menggunakan benang gigi untuk membersihkan sisa makanan yang masih tersangkut di sela-sela gigi.

Mengurangi Bau Mulut

Kebersihan mulut yang tidak terjaga sering kali menjadi penyebab utama timbulnya bau mulut atau halitosis. Untuk mengatasi hal ini tidak cukup dengan rutin menyikat gigi. Anda juga dianjurkan untuk melakukan oil pulling dengan minyak wijen atau minyak kelapa. Ini karena minyak tersebut dapat membantu mengurangi jumlah bakteri penyebab bau mulut.

Memutihkan Gigi

Oil pulling sering diklaim dapat membersihkan noda pada permukaan

gigi sehingga menjadi salah satu cara memutihkan gigi secara alami. Namun, efektivitas oil pulling yang satu ini masih belum terbukti dan perlu diteliti lebih lanjut. Berbagai manfaat oil pulling di atas memang baik untuk kesehatan gigi dan mulut. Namun, secara umum, riset yang mendukung efektivitas dan keamanan oil pulling sebagai metode perawatan gigi dan mulut masih sangat terbatas.

Jadi, manfaat utamanya lebih ke kesehatan mulut, tapi bukan hasil instan seperti yang sering digembargemborkan iklannya.

Cara Melakukan Oil Pulling

Cara melakukan oil pulling terbilang sederhana dan mudah. Anda cukup berkumur seperti biasa, hanya saja bahan yang digunakan adalah minyak nabati. Namun, bagi Anda yang baru pertama melakukannya mungkin akan terkejut dengan sensasi berminyak di dalam mulut.

Jika tertarik mencoba oil pulling, Anda dapat mengikuti langkah-langkah sederhana. Pertama, pilih minyak sesuai kebutuhan, seperti minyak kelapa, minyak wijen, atau minyak zaitun, lalu takar satu sendok makan. Kumurlah seperti biasa selama 15-20 menit, namun jika baru pertama kali mencobanya, mulai dengan 5 menit. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi menjadi 10 menit atau langsung 20 menit jika sanggup.

Setelah selesai, buang minyak ke tempat sampah untuk menghindari penyumbatan saluran pembuangan, bukan ke wastafel atau toilet. Terakhir, bilas mulut dengan air dan lanjutkan menyikat gigi seperti biasa. (nei,ist/dya)



CINCIN API PASIFIK, JALUR GEMPA DAN GUNUNG API DUNIA



Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui oleh Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik. Salah satu buktinya adalah frekuensi gempa bumi di Indonesia yang terbilang lebih sering dibandingkan banyak negara lainnya. Namun, sudahkah Anda tahu apa sebenarnya yang dimaksud dengan Cincin Api Pasifik?

Sejarah Singkat Cincin Api Pasifik

Bersumber dari World Atlas, Cincin Api Pasifik merupakan salah satu karakteristik perairan Samudra Pasifik.

Samudra Pasifik merupakan samudra terbesar di dunia dengan luas lebih dari 60 juta mil persegi atau lebih

dari 155 juta kilometer persegi. Bisa dikatakan, 28 persen dari seluruh luas permukaan bumi adalah Samudra Pasifik serta 46 persen dari seluruh luas permukaan air di bumi adalah Samudra Pasifik.

Pada 1520, Ferdinand Magellan, seorang penjelajah asal Portugis berlayar di perairan Samudra Pasifik. Magellan merasakan kawasan perairan yang tenang. Karena ketenangan itulah maka Magellan menamai kawasan perairan tersebut dengan sebutan Mar Pacifico yang artinya Laut yang Damai.

Magellan sepertinya belum memperhitungkan keberadaan ring of fire di samudra itu.

Apa Itu Cincin Api Pasifik?

Cincin Api Pasifik adalah kedalaman laut tempat terjadinya gempa bumi dan letusan gunung berapi. Lokasi tepatnya berada di tepi bawah laut Samudra Pasifik. Gempa yang terjadi pada 30 Juli 2025 di pesisir timur Kamchatka, Rusia, hingga menyebabkan tsunami adalah contoh gempa dari cincin api tersebut.

World Atlas menggambarkan bentuk ring of fire menyerupai huruf U. Panjangnya kira-kira 40.250 kilometer dengan lebar 500 kilometer. Dengan luas tersebut, Cincin Api Pasifik menjadi tempat

pembentukan 450 gunung berapi.

Dengan luas dan jumlah gunung berapi di atas, tak mengherankan bila seluruh aktivitas vulkanik dan gempa bumi di bumi ini terjadi di sekitar kawasan Cincin Api Pasifik.

Aktivitas vulkanik terjadi saat lempeng Pasifik bergeser ke lempeng tektonik lain yang berdekatan dengan titik lokasinya berada. Akibat pergeseran lempeng tersebut, maka terjadi pembentukan palung bawah laut dalam. Contohnya Palung Mariana.

Deretan Negara Dilalui Ring of Fire

Pada dasarnya, wilayah yang dilalui Cincin Api Pasifik masih diperdebatkan para ahli geologi dan oseanografi. Beberapa wilayah yang dilewatkan ring of fire di antaranya pesisir Pasifik Amerika Utara, Amerika Selatan, Semenanjung Kamchatka dan beberapa pulau di sekitar Pasifik Barat.

Sementara, menurut artikel di Deutsche Welle, negara-negara yang dilalui Cincin Api Pasifik di antaranya Australia, Filipina, Jepang, Malaysia, Fiji, Kepulauan Solomon, Selandia Baru, pesisir barat Amerika Utara dan Selatan, serta Papua Nugini dan negara lainnya termasuk Indonesia.

Meski begitu, World Atlas menjelaskan wilayah Cincin Api Pasifik di Indonesia masih jadi perdebatan yang cukup intens. Hal tersebut lantaran letak sabuk cincinnya dan wilayah yang sering mengalami gempa bumi ataupun letusan gunung berapi. Karena dua alasan tersebut maka sering kali dianggap oleh beberapa ahli geologi kalau hampir seluruh wilayah Indonesia termasuk Cincin Api Pasifik. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH | **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Kebiasaan Sederhana yang Bikin Kulit Cerah Alami

Banyak orang mendambakan kulit wajah yang cerah dan sehat, namun sering kali tidak menyadari bahwa rahasia untuk mencapainya justru ada pada kebiasaan-kebiasaan kecil yang kerap terabaikan. Tanpa disadari, asupan makanan, kualitas tidur, dan kecukupan konsumsi air memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan kulit.

Menariknya, sebagian besar kebiasaan ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang asing bagi kita. Walau sering dilakukan, banyak orang belum memahami efek jangka panjangnya terhadap kesehatan kulit wajah. Padahal, jika dijalankan secara konsisten dan dengan cara yang tepat, manfaatnya bisa menyaingi hasil perawatan mahal di klinik kecantikan.

Berikut tujuh kebiasaan sederhana yang terbukti secara ilmiah mampu membuat wajah terlihat lebih cerah. Tidak perlu menghabiskan uang untuk serum mahal atau masker langka, cukup terapkan dengan konsisten, dan hasilnya akan terlihat nyata.

Minum Air Putih Rutin

Menurut informasi dari situs kesehatan Halodoc, kekurangan asupan air dapat menyebabkan kulit menjadi kusam. Sebaliknya, menjaga hidrasi yang optimal dapat mempercepat proses regenerasi kulit. Air merupakan komponen penting bagi tubuh, termasuk kesehatan kulit. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal *Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology*, jumlah air yang cukup sangat berpengaruh terhadap kelembapan dan elastisitas kulit.

Untuk menjaga kesehatan kulit, ada beberapa langkah sederhana yang dapat diikuti. Pertama, disarankan untuk minum minimal 8 gelas air setiap hari.

Tidur Cukup

Kurang tidur dapat menyebabkan munculnya lingkaran hitam di bawah mata serta kulit yang tampak kusam. Sebaliknya, tidur yang cukup berkontribusi pada kulit yang cerah dan sehat. Saat kita tidur di malam hari, tubuh melakukan proses perbaikan pada jaringan kulit yang mengalami kerusakan dan juga membuang racun yang terakumulasi. Ketika tidur tidak mencukupi, hormon stres dalam tubuh justru meningkat, yang dapat berakibat negatif bagi kesehatan kulit. Lingkaran

gelap di bawah mata, munculnya jerawat, dan ketidakmerataan warna kulit sering kali menjadi masalah yang muncul akibat kurangnya istirahat yang berkualitas.

Makan Makanan Bergizi

Wajah kita mencerminkan apa yang kita konsumsi. Asupan makanan memiliki dampak besar terhadap kesehatan kulit kita. Konsumsi sayur dan buah yang kaya akan antioksidan dapat membantu melawan radikal bebas yang menjadi penyebab utama kulit tampak kusam. Di sisi lain, makanan yang mengandung banyak minyak dan gula dapat memperburuk kondisi jerawat serta menghambat proses regenerasi kulit.

Untuk menjaga kesehatan kulit, ada beberapa langkah mudah yang bisa diikuti. Perbanyak sayur hijau, buah seperti stroberi, jeruk, kiwi. Selain itu, penting untuk menghindari makanan olahan dan gorengan yang berpotensi merusak kulit. Tidak lupa, sertakan juga omega-3 yang bisa ditemukan dalam ikan dan kacang-kacangan untuk menjaga kelembapan kulit agar tetap terjaga.

Rutin Pakai Tabir Surya

Sinar ultraviolet (UV) merupakan ancaman utama bagi kulit yang ingin tetap cerah. Oleh karena itu, penggunaan sunscreen menjadi sangat penting sebagai pelindung yang paling efektif. Paparan sinar matahari dapat mempercepat proses pembentukan melanin, yang merupakan pigmen yang membuat kulit menjadi lebih gelap. Oleh karena itu, tabir surya seharusnya tidak hanya digunakan saat berkunjung ke pantai, melainkan juga harus menjadi bagian dari rutinitas harian, termasuk ketika berada di dalam ruangan yang terpapar cahaya buatan.

Untuk melindungi kulit secara optimal, langkah-langkah perlindungan yang tepat perlu diambil. Gunakan SPF minimal 30 setiap pagi, ulangi setiap 2-3 jam. Pastikan untuk mengaplikasikan sunscreen tidak hanya di wajah, tetapi juga di area leher dan tangan.

Detoks dengan Lemon dan Madu

Meminum air lemon yang dicampur dengan madu setiap pagi dapat membantu proses detoksifikasi serta memberikan efek bercahaya yang alami pada kulit. Lemon mengandung banyak vitamin C yang berperan sebagai antioksidan alami, sedangkan madu

memiliki sifat antimikroba yang sangat bermanfaat. Kombinasi dari kedua bahan ini diyakini dapat membersihkan darah, mendukung fungsi hati, dan mempercepat regenerasi kulit. Dengan rutin mengonsumsinya, kulit akan terlihat lebih bersih dan cerah dari dalam.

Pijat Wajah dengan Minyak Relaksasi

Sirkulasi yang baik berkontribusi pada nutrisi kulit yang optimal, yang pada gilirannya membuat wajah tampak lebih cerah secara alami. Salah satu cara untuk meningkatkan sirkulasi ini adalah dengan melakukan pijat wajah, yang tidak hanya membantu mengendurkan otot-otot, tetapi juga meningkatkan aliran darah ke kulit dan memaksimalkan penyerapan nutrisi dari produk perawatan kulit.

Beberapa jenis minyak alami, seperti tea tree, zaitun, dan mawar, memiliki sifat anti-inflamasi dan antibakteri yang sangat bermanfaat bagi kesehatan kulit. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, Anda bisa melakukan pijatan lembut selama 5 hingga 10 menit sebelum tidur.

Gunakan Krim Malam

Krim malam memiliki peran penting dalam mendukung regenerasi sel kulit saat kita beristirahat. "Efeknya: kulit merata dan glowing." Ketika tidur, kulit kita lebih mudah menyerap produk perawatan karena suhu tubuh yang meningkat dan sirkulasi darah yang lebih baik. Menggunakan krim malam yang mengandung vitamin A, C, E, serta emolien seperti shea butter atau peptida dapat membantu memperbaiki sel-sel kulit dan merangsang pembentukan kulit baru yang lebih bercahaya.

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, penting untuk memilih krim malam yang sesuai dengan permasalahan kulit yang dihadapi.

Aplikasikan produk ini setelah mencuci wajah dan menggunakan toner, agar semua manfaatnya dapat terserap dengan baik. Pastikan untuk menggunakan krim

malam secara rutin setiap malam agar hasil yang diinginkan dapat tercapai dengan maksimal.

Alasan Perawatan Alami

Dalam sebuah penelitian yang ditulis oleh Siti Mayanfa`uni Al Ilhami dan Grendi Hendrastomo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul "Perawatan Kulit Wajah Sebagai Gaya Hidup Laki-Laki", terungkap bahwa semakin banyak individu yang mulai memperhatikan perawatan dan pencerahan wajah.

Kini, banyak pria juga terlibat dalam rutinitas perawatan kulit wajah, dipicu oleh motivasi pribadi, tuntutan sosial, serta pengaruh budaya populer yang menciptakan gaya hidup baru. Penelitian ini mencatat bahwa terdapat sejumlah alasan yang mendorong pria untuk melakukan perawatan kulit wajah demi mencapai penampilan yang diinginkan. (nei,ist/dya)



Kasus Haji (dari Hal 1) ...

KPK akan menasar semua pihak yang terlibat untuk menggali fakta siapa saja pihak yang diduga berhubungan atau memperoleh keuntungan dari pembagian kuota haji. Selain itu KPK juga membeberkan telah melakukan pencekalan atau pelarangan bepergian ke luar negeri terhadap Gus Yaqut dan dua orang lainnya.

"Setiap proses hukum berangkat dari alat bukti, KPK berkomitmen menuntaskan perkara ini," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dilansir republika, Selasa (12/8/2025)

Bahkan dia juga mengatkaan semua pihak berpeluang dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini, tak terkecuali Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi atasan Menag saat itu. KPK berharap pemanggilan saksi dapat membuat terang perkara ini.

"Pemanggilan terhadap semua saksi tentu tergantung kebutuhan dari penyidik. KPK terbuka untuk memanggil siapa saja yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini dan dapat membantu membuka dan membuat terang dari penanganan perkara ini," ujar Budi.

Tapi KPK masih merahasiakan nama saksi yang segera dipanggil. "Belum bisa kami sampaikan," ucap Budi.

Sebelumnya, KPK sudah meminta keterangan mantan menag Gus Yaqut pada 7 Agustus. Pascapemeriksaan itu KPK menaikkan status perkara ke penyidikan tanpa menyebutkan tersangkanya.

Dalam hal ini, KPK menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum dalam menangani kasus dugaan korupsi haji. Artinya, belum ada tersangka yang ditetapkan begitu Sprindik diteken. Pihak-pihak yang bertanggung jawab akan dicari dalam proses penyidikan berjalan.

"KPK menerbitkan Sprindik umum dengan penguasaan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana," kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Sabtu (9/8/2025) lalu.

Kendati demikian, Budi belum bisa memastikan penetapan tersangka terkait perkara penentuan kuota haji tersebut karena masih dibutuhkan pemeriksaan pihak-pihak yang berkaitan dengan konstruksi perkara. "Nanti kami akan update ya, karena tentu dalam proses penyidikan ini KPK perlu memeriksa juga pihak-pihak yang mengetahui perkara ini," ujar Budi.

Di sisi lain, KPK juga mengatakan telah mencegah atau mencekal tiga

orang bepergian ke luar negeri terkait kasus ini. Pencegahan itu sudah diajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Tiga orang tersebut yaitu Menag periode 2020-2024 Yaqut Cholil Qoumas; mantan staf khusus Menag Bidang Ukhuwah Islamiyah, Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Keagamaan, serta Moderasi Beragama Ishfah Abidal Aziz (IAA); dan pemilik Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur (FHM).

Fuad juga merupakan mertua Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo. "Pada tanggal 11 Agustus 2025, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap tiga orang yaitu YCQ, IAA, dan FHM terkait dengan perkara sebagaimana tersebut di atas," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (12/8/2025).

Masa pencegahan berlaku selama enam bulan mulai 11 Agustus 2025 sampai 11 Februari 2026. Meski demikian pencegahan bisa diperpanjang berdasarkan kebutuhan penyidikan. Lebih lanjut Budi mengatakan pencegahan diperlukan lantaran ketiga orang itu perlu diperiksa di Indonesia. Sehingga KPK tak ingin ketiganya meninggalkan Indonesia saat penyidikan berjalan.

"Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh KPK karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas," ucap Budi.

Dia menandakan, penyidik KPK sudah memeriksa sejumlah orang dalam kasus kuota haji khusus. Mereka adalah eks menag Yaqut, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, pegawai Kemenag berinisial RFA, MAS, dan AM, pemilik Travel Uhud Tour Ustadz Khalid Basalamah, Sekjen Amphuri Muhammad Farid Aljawi, serta Ketua Umum Kesthuri Asrul Aziz.

Saat ini, KPK tengah menelusuri dugaan keterlibatan oknum di Kemenag yang menyalurkan kuota haji tidak sesuai aturan dan memberikan jatah kuota haji khusus kepada perusahaan travel. Oknum itu diduga mendapat kickback dari pihak travel.

Padahal porsi kuota haji khusus maksimal delapan persen, sedangkan kuota haji reguler sebesar 92 persen sesuai aturan UU Haji. Tetapi, muncul kegagalan kuota 20.000 jemaah dari pemerintah Arab Saudi pada 2024 yang dibagi rata 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.

KPK turut mendalami dugaan aliran dana kepada pihak travel umrah yang mendapat kuota haji

khusus walau mestinya tidak mendapatkannya. Kuota itu lalu dijual demi mendapat keuntungan.

Dari perhitungan awal KPK, kasus ini diduga merugikan negara lebih dari Rp 1 triliun. KPK menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung angka kerugian negara dalam kasus ini.

"Di mana dalam perkara ini (kuota haji) hitungan awal dugaan kerugian negaranya lebih dari 1 triliun," ujar Budi, Senin (11/8/2025).

Penetapan tersangka merujuk pada Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Perkara itu naik ke tahap penyidikan pada Jumat (8/8/2025), lewat surat perintah penyidikan (sprindik) umum tanpa menyebutkan siapapun sebagai tersangka.

Sementara itu, Yaqut sendiri memenuhi panggilan KPK untuk menjelaskan soal kasus pembagian kuota haji 2024. Juru bicara Yaqut, Anna Hasbi menjelaskan bahwa pembagian kuota haji pada 2024 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Pembagian haji itu sudah dilaksanakan menurut undang-undang yang berlaku," kata Anna di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/8/2025) lalu.

Yaqut yang saat itu memenuhi panggilan KPK, kata Anna, menjadi bukti bahwa mantan Menag itu mentaati proses hukum yang berjalan. Ia mengatakan, Yaqut akan memberikan penjelasan kepada KPK soal kuota tambahan haji pada 2024 yang dibagi untuk kuota reguler dan kuota khusus.

"Karena pembagian kuota itu memang hal yang cukup rumit. Jadi harus ada penjelasan yang menyeluruh. Jadi nanti kita tunggu dari beliau apa yang ditanyakan di dalam," ujar Anna.

Anna juga membantah pembagian kuota haji tambahan melanggar undang-undang. "Pembagian haji itu sudah dilaksanakan menurut undang-undang yang berlaku, jadi memang prosesnya cukup panjang," kata Anna saat itu.

Ia mengatakan, Yaqut bisa memberikan keterangan detail soal dasar hukum pembagian kuota haji. Penjelasan akan dipaparkan kepada penyidik KPK. "Itu sebabnya beliau (Yaqut) memberikan keterangan, akan menjelaskan bagaimana proses itu dilakukan, karena itu bukan proses yang sekali jadi, jadi itu memang proses yang panjang," ucap Anna.

Anna juga membantah pembagian kuota haji didasari permintaan perusahaan travel. Sebab, keputusan semuanya ada pada tabungan pemerintah. "Kan kuota itu dibagi oleh

pemerintah. Jadi, ada permintaan atau tidak permintaan itu memang pembagian kuota itu dilakukan menurut undang-undang yang berlaku," tegas Anna.

KPK membeberkan fakta baru dalam penyelidikan dugaan rasuah terkait kuota haji di Kemenag. Ada praktik mengotak atik persentase kuota haji khusus dan reguler.

"Jadi begini, ada aturannya bahwa untuk kuotanya itu delapan (persen) sama 92 (persen), kalau tidak salah, delapan persen itu untuk haji khusus, dan 92 persen untuk reguler," kata Direktur Penyidik KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam keterangannya di Jakarta, dikutip pada Sabtu (26/7/2025).

Asep mengatakan, persentase itu dibuat setelah pemerintah Indonesia mendapatkan tambahan 20 ribu jatah kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi. Tapi, malah ada aturan sendiri yang dinilai menguntungkan haji khusus dan merugikan jemaah reguler.

"Tetapi, kemudian ternyata dibagi dua, 50 (persen), 50 (persen), seperti itu. Yang seharusnya pembagiannya itu (8 persen dan 92 persen)," ucap Asep.

Di satu sisi, Ketua KPK, Setyo Budiyo mengatakan ada sekitar 10 agen perjalanan atau travel yang diduga diuntungkan dari kasus penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.

"Ya lebih kurang, lebih kurang sekitar segitu lah," kata Setyo mengiyakan pertanyaan wartawan saat ditemui di UGM, Sleman, DIY, Selasa (12/8/2025).

Setyo menyebut terdapat agen travel besar hingga kecil yang mendapat keuntungan dalam penentuan kuota haji tersebut. "Setidaknya ada travel-travel bisa dikategorikan travel besar, kemudian melibatkan travel sedang, juga termasuk beberapa travel kecil," ucapnya.

Menurutnya, perihal dugaan keuntungan yang didapat oleh pihak swasta dalam kasus ini akan terungkap secara lebih spesifik melalui hasil pemeriksaan.

Dugaan penyimpangan dalam penetapan kuota haji 2024 bermula dari temuan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji yang dibentuk setelah Tim Pengawas atau Timwas Haji DPR menemukan berbagai persoalan penting dalam pelaksanaan haji yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama.

Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, DPR memutuskan membentuk Pansus Haji untuk meninjau ulang penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah. Pembentukan pansus ini disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (4/7/2024). (han,ant,ist/lut)



DPRD SURABAYA KAWAL PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PRO-RAKYAT

SURABAYA-DPRD Kota Surabaya dan Wali Kota Eri Cahyadi, pada 5 Agustus lalu, telah menetapkan Perubahan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara) tahun 2005. Keduanya adalah dokumen penting, yang mendahului dan satu rangkaian dengan pembahasan serta penetapan APBD Perubahan tahun 2025. Infrastruktur menjadi prioritas penting dalam alokasi anggaran sampai akhir tahun ini.

Dalam rapat paripurna DPRD, tercatat kemampuan belanja Kota Surabaya diproyeksikan Rp 12,3 triliun. Termasuk melalui pembiayaan alternatif alias pinjaman dari Bank Jatim sebesar Rp 450,2 miliar yang sepenuhnya untuk penguatan infrastruktur yang diperlukan oleh masyarakat.

Pertama, untuk pengerjaan JLLB (Jalan Lingkar Luar Barat) Rp 42,1 miliar. Kedua, pelebaran jalan Wiyung-Lakarsantri Rp 130,2 miliar. Ketiga, penanganan banjir Rp 179,3 miliar. Keempat, pengerjaan drainase diversifikasi Gunung Sari Rp 50,1 miliar. Kelima, penerangan jalan umum atau PJU Rp 50,3 miliar.

Karena dari alokasi APBD, setelah dikurangi belanja wajib, hanya tersisa Rp 1,7 triliun untuk pembangunan. "Dengan penetapan KUA-PPAS, DPRD mendukung upaya-upaya dari Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan percepatan infrastruktur pembangunan. Dampaknya, seperti mengurangi kepadatan kendaraan dan memperlancar lalu lintas, menekan ancaman banjir, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan kesepakatan itu, DPRD fokus pada pembangunan infrastruktur, mengawasi dan mengawal agar tepat target sekaligus sasaran," kata Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Kota Surabaya.

Dikatakan, sebelum penetapan, Badan Anggaran DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan konsultasi dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan BPK Jawa Timur atas pembiayaan alternatif atau pinjaman dari Bank Jatim sebesar Rp



(Ki-ka) Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono bersama Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah serta Bahtiar Rifai dalam rapat paripurna di gedung DPRD Surabaya beberapa waktu lalu. (dok)

450,2 miliar.

"Dipastikan juga studi kelayakan dari proyek-proyek infrastruktur, dan pengerjaan tahun ini selesai. Juga, pelunasan pinjaman harus berakhir di masa periode kepala daerah. Dan, kemampuan fiskal Surabaya cukup mumpuni. Dalam skema pinjaman, pelunasan terjadi 2029," kata Adi Sutarwijono.

Dalam studi kelayakan yang dikantongi Bappedalitbang Kota Surabaya, pembiayaan alternatif atau pinjaman Bank Jatim dalam proyek-proyek skala Kota Surabaya akan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 2 persen. Tahun 2025, target pertumbuhan ekonomi mencapai 5,76 persen. Proyeksi ini berasal dari potensi konektivitas antarwilayah dan pertumbuhan berbagai jenis usaha yang berkembang di Kota Surabaya.

Selain proyek-proyek skala kota, DPRD Kota Surabaya juga memastikan pengerjaan proyek-proyek skala kampung atau pemukiman yang dijangkau dari berbagai aspirasi masyarakat dikerjakan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

"Seperti perbaikan jalan atau pavingisasi, pengerjaan saluran air, penerangan jalan umum, perbaikan Balai RW. Begitu juga perbaikan rumah tidak layak huni atau rutilahu, yang kesemua itu banyak diusulkan oleh warga masyarakat. Bahkan, sampai tahun 2027, proyek-proyek skala kampung atau pemukiman, kesepakatan kami dengan Pemerintah Kota Surabaya bisa relatif rampung

atau tuntas," kata Adi Sutarwijono.

Dikatakan, proyek-proyek yang berhubungan dengan hajat hidup masyarakat banyak, terlebih wong cilik, harus dituntaskan. Karena itu semua dijangkau dari berbagai aspirasi masyarakat, seperti musrenbang dan penjangkauan aspirasi masyarakat yang dilakukan aparat Pemerintah Kota Surabaya maupun legislator DPRD Kota Surabaya.

"Kami tidak sependapat jika terjadi pengurangan anggaran. Seperti perbaikan rumah tidak layak huni bagi keluarga-keluarga miskin. Kalau perlu diperkuat anggarannya, sehingga pelayanan pembangunan bisa dirasakan dampaknya dengan jelas bagi rakyat, terutama wong cilik. Kesejahteraan masyarakat semakin dirasakan dan meningkat," kata Adi.

DPRD Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya menuntaskan pembahasan anggaran dengan melalui tahapan yang benar dan cermat. "Terpenting lagi, tidak melampaui limit waktu. Sehingga Pemerintah Kota Surabaya tersedia cukup waktu untuk merealisasikan pengerjaan bagi kepentingan masyarakat," kata Adi.

Maka, penguatan pendapatan APBD Kota Surabaya menjadi perhatian kalangan anggota DPRD. Misal, optimalisasi berbagai pajak dan retribusi. Para legislator menyampaikan sikap-sikap kritis terhadap Pemerintah Kota Surabaya. Seperti kebocoran parkir, pajak reklame, pajak makanan dan

minuman, pajak bumi dan bangunan alias PBB, BPHTB, dan jenis-jenis pajak dan retribusi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah yang menjadi kewenangan Kota Surabaya.

"Untuk memperkuat aspek pendapatan daerah, kita tidak sepakat dilakukan kenaikan tarif dan retribusi, yang membebani masyarakat. Tetapi, sebaliknya kita dorong terus Pemerintah Kota Surabaya untuk menekan kebocoran pajak dan retribusi, dengan melakukan inovatif yang kreatif untuk optimalisasi pendapatan asli daerah," kata Adi Sutarwijono. (ADV)



"Untuk memperkuat aspek pendapatan daerah, kita tidak sepakat dilakukan kenaikan tarif dan retribusi, yang membebani masyarakat. Tetapi, sebaliknya kita dorong terus Pemerintah Kota Surabaya untuk menekan kebocoran pajak dan retribusi, dengan melakukan inovatif yang kreatif untuk optimalisasi pendapatan asli daerah."

ADI SUTARWIJONO

Ketua DPRD Kota Surabaya.

